Kementerian PU Percepat Normalisasi 38 Muara Sungai di Sumatera

Category: NASIONAL
written by Saumi R News Tv | August 24, 2026



SEANTERONEWS.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara resmi mengumumkan percepatan program penanganan terintegrasi terhadap 38 muara sungai yang tersebar di tiga provinsi utama di Pulau Sumatera. Inisiatif strategis ini merupakan respons cepat pemerintah atas kondisi pascabencana yang menyebabkan pendangkalan kritis di wilayah pesisir, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Langkah ini diambil untuk memulihkan fungsi vital aliran sungai sebagai jalur utama pembuangan air menuju laut. Berdasarkan data pembaruan Kementerian PU per 22 Agustus 2026, tumpukan sedimen padat berupa campuran lumpur, pasir, dan material yang terbawa dari hulu akibat bencana menjadi ancaman utama.

Jika dibiarkan, akumulasi material ini akan menyumbat alur buangan, yang pada gilirannya memicu luapan air ke permukiman padat penduduk dan lahan produktif masyarakat di sekitarnya.

“Fokus kami saat ini adalah memulihkan kapasitas tampung dan aliran sungai secara masif. Pendangkalan pascabencana menghambat laju air ke laut, sehingga risiko banjir susulan di kawasan pesisir menjadi sangat tinggi jika tidak segera diatasi,” demikian inti arahan teknis dari Kementerian PU.

Dalam eksekusi di lapangan, Kementerian PU menerapkan pola kolaboratif lintas sektor mengingat luasnya cakupan wilayah. Penanganan 38 sasaran muara sungai ini dibagi berdasarkan status kewenangan untuk memastikan efektivitas penggunaan sumber daya.

Detailnya, 25 muara sungai yang berstatus kewenangan nasional akan ditangani secara langsung oleh Kementerian PU. Pelaksanaannya dilakukan melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) setempat dengan mengerahkan armada alat berat utama skala besar.

Sementara itu, untuk 13 muara sungai yang berada di bawah kewenangan provinsi, Kementerian PU menjalankan skema penanganan kolaboratif bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dan instansi terkait. Sinergi ini mencakup penggabungan sumber daya manusia dan armada pendukung agar target pemulihan tercapai sesuai jadwal.

Kementerian PU menyadari bahwa setiap muara memiliki karakteristik morfologi, kondisi pasang surut, dan jenis sedimen yang unik. Oleh karena itu, intervensi teknis yang diterapkan tidak bersifat seragam, melainkan terukur dan disesuaikan dengan kondisi spesifik setiap lokasi.

Setidaknya tiga metode teknis utama dikerahkan dalam operasi ini:

Pengerukan Sedimen Skala Besar: Armada khusus seperti kapal

keruk (dredger), excavator long arm, dan excavator amfibi dioperasikan untuk membersihkan pendangkalan alur secara efektif.

Normalisasi Alur Sungai: Upaya ini difokuskan untuk mengembalikan dimensi penampang ideal alur sungai, memastikan kapasitas tampung air tetap optimal terutama saat intensitas hujan tinggi terjadi di wilayah hulu.

Pembangunan Infrastruktur Pengendali Sedimen: Selain pembersihan downstream, pemerintah juga membangun infrastruktur permanen di area transisi, seperti sabo dam (bangunan penahan sedimen). Ini berfungsi untuk menahan erosi susulan dari hulu agar pendangkalan tidak terjadi kembali dalam waktu dekat.

Percepatan penanganan muara sungai ini dirancang dalam kerangka Build Back Better (Membangun Kembali Lebih Baik), yang berarti perbaikan tidak hanya mengembalikan fungsi awal, tetapi juga meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap bencana di masa depan.

Manfaat langsung dari langkah ini dirasakan oleh masyarakat pesisir dalam dua aspek vital. Pertama, permukiman mereka kini lebih aman dari ancaman banjir rob dan banjir kiriman. Kedua, dan tidak kalah penting, pemulihan alur muara ini mengembalikan akses pelayaran vital bagi nelayan lokal. Banyak komunitas nelayan di wilayah terdampak sangat mengandalkan alur muara sungai sebagai jalur utama lalu lintas perahu untuk pergi dan pulang melaut. Dengan normalisasi alur, aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan dapat kembali berjalan normal dan stabil.[]